

ABSTRAKSI

Judul : Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kata Kunci : Penyerapan APBD, Kualitas SDM, Perencanaan Anggaran, Komitmen manajemen

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah salahsatu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa: Laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK). LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, dalam dokumen tersebut terbaca jumlah rencana dan realisasi pendapatan dan belanja selama satu periode.

Jullie J. Sondakh, dkk (2017) menyatakan bahwa Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa bahwa realisasi pendapatan dan belanja tidak terlaksana secara keseluruhan (100%), hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana, secara umum penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan , namun terdapat hambatan dan kendala adanya wabah covid 19 sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan program dan kegiatan, terutama program dan kegiatan strategis dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

Masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT
2. Bagaimana pengaruh perencanaan anggaran terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT
3. Bagaimana pengaruh komitmen manajemen terhadap rendahnya penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT

Dari hasil pengujian regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,214 + 0,286 X_1 + 0,071 X_2 + 0,786X_3$$

1. Nilai constant sebesar 5.214 artinya jika nilai kualitas SDM, Perencanaan Anggaran, Komitmen manajemen dengan nol maka, penyerapan APBD akan meningkat sebesar 5,214
2. Koefisien (b1) sebesar 0,286 artinya apabila Kualitas SDM mengalami kenaikan sebesar satu maka, Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,286 dengan asumsi variabel lainnya constant.
3. Koefisien (b2) sebesar 0,071 artinya apabila perencanaan anggaran mengalami kenaikan sebesar satu maka Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,071 dengan asumsi variabel lainnya constant.
4. Koefisien (b3) sebesar 0,786 artinya apabila Komitmen Manajemen mengalami kenaikan sebesar satu maka Penyerapan APBD akan meningkat sebesar 0,786 dengan asumsi variabel lainnya constant.

- hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X1 kualitas Sumberdaya manusia memiliki nilai t hitung sebesar 2,577 dengan sig sebesar 0,022. Karena nilai sig $0,022 < 0,05$, maka diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis pertama diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya ada pengaruh positif Kualitas SDM dengan Penyerapan Anggaran Belanja

hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X2 yakni penyerapan anggaran memiliki nilai t hitung sebesar 1,204 dengan sig sebesar 0,047. Karena nilai sig $0,047 < 0,05$, maka diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis kedua diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya pengaruh positif penyerapan anggaran dengan Penyerapan Anggaran Belanja

- hasil uji t diatas, dapat dapat diketahui variabel X3 yakni komitmen manajemen memiliki nilai t hitung sebesar 1,588 dengan sig sebesar 0,039. Karena nilai sig $0,039 < 0,05$, maka diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga hipotesis ketiga diterima. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Artinya ada pengaruh positif Komitmen manajemen dengan Penyerapan Anggaran Belanja

Hasil analisis atas persoalan penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan 3 hal sesuai dengan rumusan persoalan penelitian yakni

1. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
2. Variabel Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
3. Variabel variabel komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan APBD pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan simpulan diatas, maka beberapa implikasi terapan berupa saran sebagai berikut

1. Bagi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT
Semakin dimaksimalkan penyerapan APBD dengan meningkatkan kualitas SDM, Perencanaan yang baik dan komitmen Manajemen
2. Bagi Peneliti selanjutnya
Menambah metode survey dengan melakukan wawancara menyeluruh bukan saja kepada pimpinan tetapi juga semua ASN yang terlibat dalam pelaksanaan program